

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>	1
MOTTO	lxxxvii
PERSEMBAHAN	lxxxviii
KATA PENGANTAR	lxxxix
DAFTAR ISI	xcii
DAFTAR GAMBAR	xcvi
DAFTAR TABEL	xcvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	17
C. Tujuan penelitian	17
D. Manfaat penelitian	18
E. Kerangka konseptual	19
F. Kerangka teori	21

1. Teori negara hukum integratif	28
2. Teori keadilan bermartabat	30
3. Teori bekerjanya hukum	35
4. Teori Kesehatan Masyarakat	41
5. Teori Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran	48
6. Teori Kewenangan	57
G. Kerangka Pemikiran	65
H. Metode penelitian	68
1. Paradigma penelitian	68
2. Jenis penelitian	69
3. Sifat penelitian	70
4. Metode pendekatan	71
5. Lokasi penelitian	72
6. Sumber informasi atau informan	72
7. Instrumen penelitian	73
8. Sumber data penelitian	74
9. Teknik pengumpulan data	77
10. Analisis data	77
I. Sistematika penulisan disertasi	79
J. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian	80

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Hukum	81
B. Pemerintah	98

C. Peraturan Menteri Kesehatan sebagai instrumen pemerintahan ...	103
D. Pelayanan kesehatan	105
E. Penyelenggaraan klinik	117
F. Penyelenggaraan laboratorium klinik	120

**BAB III. PELAKSANAAN REGULASI PENDIRIAN DAN PENYE-
LENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK DALAM
KLINIK DI INDONESIA**

A. Pelaksanaan pendirian laboratorium klinik dalam klinik	128
1. Analisis berdasarkan Permenkes No. 9 tahun 2014	129
2. Analisis berdasarkan Permenkes No 411/MENKES/ PER/III/2010	135
B. Pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium klinik dalam klinik ..	163
C. Analisis hukum dan pelaksanaan berdasarkan teori-teori	209
D. Analisis peraturan tentang pendirian dan penyelenggaraan klinik dan laboratorium klinik di negara lain	229
1. Malaysia	229
2. Singapura	233

**BAB IV. KELEMAHAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN
REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LABORATORIUM KLINIK DALAM KLINIK**

A. Kelemahan pelaksanaan regulasi pendirian dan penyelenggaraan laboratorium klinik dalam klinik dari segi Pemerintah	249
--	-----

B.	Kelemahan pelaksanaan regulasi pendirian dan penyelenggaraan laboratorium klinik dalam klinik dari segi Peraturan yang berlaku.	297
C.	Kelemahan pelaksanaan regulasi pendirian dan penyelenggaraan laboratorium klinik dalam klinik dari segi manajemen	332
D.	Kelemahan pelaksanaan regulasi pendirian dan penyelenggaraan laboratorium klinik dalam klinik dari segi sumber daya manusia atau ketenagaan	362

BAB V. REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK DALAM KLINIK BERBASIS NILAI KEADILAN

A.	Laboratorium klinik dalam klinik sebagai bagian pelayanan kesehatan masyarakat	410
B.	Rekonstruksi Asas Pendirian dan Penyelenggaraan Laboratorium Klinik dalam Klinik	428
C.	Rekonstruksi Regulasi Pendirian dan Penyelenggaraan Laboratorium Klinik dalam Klinik	435
D.	Teori hukum humanisasi sinkronisasi	454

BAB VI. PENUTUP

A.	Kesimpulan	460
B.	Saran	464

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum. ..	37
2. Definisi dan arti dari kesehatan masyarakat	43
3. Sistem kesehatan masyarakat	45
4. Kerangka pemikiran penelitian	68
5. Karakteristik kompetensi sentral dan permukaan	400

DAFTAR TABEL

1. Aktivitas-aktivitas yang tercakup dalam manajemen sumber daya manusia	395
2. Rekonstruksi Permenkes No.9 Tahun 2014 tentang klinik mengenai laboratorium klinik di dalam klinik	445